CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DEMOKRASI DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENDIDIKAN KEDOKTERAN GIGI: ANALISIS NARATIF PENGALAMAN MAHASISWA

DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS IN DENTAL EDUCATION: NARRATIVE ANALYSIS OF STUDENT EXPERIENCES

Nabilah Luthfiah Rif'at Rohadatul'aisy , Nadin Ardila , Suryaningsi
Universitas Mulawarman, Samarinda - Indonesia
E-mail : Naluth.2607@gmail.com, nadinardila6890@gmail.com , Suryaningsi@fh.unmul.ac.id

ABSTRAK

Penerapan prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pendidikan kesehatan, termasuk pendidikan kedokteran gigi, merupakan aspek fundamental untuk menciptakan lingkungan akademik yang humanis, setara, dan etis. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengalaman mahasiswa kedokteran gigi terkait penerapan nilai demokrasi dan HAM dalam proses pembelajaran pre-klinis maupun klinis. Penelitian menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan analisis naratif terhadap 10 informan (FS, W, RY, AP, N, RT, AMA, SDP, AZ, AAK). Data diperoleh melalui kuesioner terbuka dan dianalisis melalui tahap coding naratif: kategorisasi, identifikasi pola cerita, dan penyusunan narasi kolektif. Hasil menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa merasa memiliki ruang menyampaikan pendapat (60% setuju, 40% sangat setuju) dan mengalami penghormatan terhadap hak mereka sebagai mahasiswa, antara lain hak memperoleh bimbingan, penjelasan nilai, dan perlakuan non-diskriminatif. Namun, ditemukan pula narasi mengenai praktik yang tidak sesuai prinsip HAM, seperti intimidasi, beban kerja berlebih, penugasan tidak relevan, serta komunikasi yang mendadak. Implikasi penelitian menunjukkan perlunya penguatan budaya akademik, peningkatan kompetensi pedagogik dosen, transparansi informasi, dan mekanisme pengaduan yang aman. Penelitian ini menegaskan bahwa demokrasi dan HAM belum diterapkan secara merata di seluruh aspek pendidikan kedokteran gigi.

***Kata kunci**: demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan kedokteran gigi, analisis naratif, mahasiswa.*

ABSTRACT

The application of democratic and human rights principles in health education, including dental education, is a fundamental aspect in creating a humanistic, equal, and ethical academic environment. This study aims to explore the experiences of dental students regarding the application of democratic and human rights values in pre-clinical and clinical learning processes. The study used a qualitative design with a narrative analysis approach to 10 informants (FS, W, RY, AP, N, RT, AMA, SDP, AZ, AAK). Data were obtained through an open-ended questionnaire and analyzed through narrative coding stages: categorization, identification of story patterns, and compilation of collective narratives. The results showed that the majority of students felt they had space to express

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 578
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

their opinions (60% agreed, 40% strongly agreed) and experienced respect for their rights as students, including the right to receive guidance, explanation of grades, and non-discriminatory treatment. However, narratives were also found regarding practices that were not in accordance with human rights principles, such as intimidation, excessive workloads, irrelevant assignments, and abrupt communication. The implications of this research indicate the need to strengthen academic culture, improve lecturers' pedagogical competence, promote information transparency, and establish a secure complaints mechanism. This study confirms that democracy and human rights have not been implemented evenly across all aspects of dental education.

Keywords: democracy, human rights, dental education, narrative analysis, students.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan kedokteran gigi sebagai bagian dari pendidikan profesi kesehatan memiliki tanggung jawab moral, etis, dan legal untuk menciptakan lingkungan belajar yang demokratis serta menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam konteks pendidikan kesehatan, demokrasi bukan hanya berarti kebebasan berpendapat, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses pengambilan keputusan akademik, akses yang setara terhadap sumber belajar, perlakuan yang adil, dan relasi pembelajaran yang non-hierarkis (Budiharto, 2020). Sementara itu, prinsip HAM menuntut adanya perlindungan terhadap martabat, keamanan psikologis, kebebasan dari diskriminasi, serta transparansi dalam evaluasi akademik (Sulistiowati, 2019).

Dalam pendidikan kedokteran gigi, interaksi antara mahasiswa dan dosen/pembimbing klinis memiliki dinamika yang kompleks, terutama karena peran klinis menempatkan mahasiswa pada struktur yang lebih subordinatif. Relasi kuasa tersebut dapat memengaruhi sejauh mana demokrasi dan HAM dapat diimplementasikan (Wardani & Pranata, 2023). Fenomena seperti intimidasi akademik, beban kerja yang tidak proporsional, komunikasi mendadak, atau kurangnya transparansi penilaian sering muncul dalam penelitian sebelumnya sebagai bentuk pelanggaran nilai HAM dalam pendidikan profesi kesehatan.

Meskipun berbagai kebijakan pendidikan nasional telah menekankan pentingnya etika, HAM, dan demokrasi dalam pembelajaran, belum banyak penelitian yang menyoroti penerapan kedua prinsip tersebut secara lebih spesifik dalam konteks kedokteran gigi, terutama dari perspektif mahasiswa sebagai subjek utama pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana mahasiswa kedokteran gigi memaknai pengalaman mereka terkait penerapan nilai demokrasi dan HAM dalam pendidikan pre-klinik dan klinik.

Penelitian ini bertujuan menghasilkan narasi komprehensif mengenai pengalaman mahasiswa, mengidentifikasi area yang telah baik maupun yang perlu perbaikan, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi institusi pendidikan kedokteran gigi.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian mengenai penerapan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam pendidikan kedokteran gigi, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana prinsip demokrasi diterapkan dalam proses pembelajaran dan interaksi di pendidikan kedokteran gigi?
2. Bagaimana penghormatan terhadap hak asasi manusia tercermin dalam praktik pendidikan kedokteran gigi?
3. Apa kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia di lingkungan pendidikan kedokteran gigi?
4. Bagaimana persepsi mahasiswa dan dosen mengenai penerapan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam pendidikan kedokteran gigi?

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan penerapan prinsip demokrasi dalam pendidikan kedokteran gigi.
2. Menganalisis implementasi hak asasi manusia dalam lingkungan pendidikan kedokteran gigi.
3. Mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
4. Mengetahui persepsi mahasiswa dan dosen mengenai penerapan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam pendidikan kedokteran gigi.

Manfaat Penelitian

Manfaat Akademis

Memberikan informasi dan referensi bagi pengembangan kurikulum pendidikan kedokteran gigi yang lebih menghargai prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Manfaat Praktis

1. Bagi mahasiswa kedokteran gigi:

   Membantu mahasiswa memahami kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk bersaing pada era internasionalisasi. Memberikan gambaran tentang pentingnya pembelajaran global, penguasaan teknologi, dan komunikasi lintas budaya.

2. Bagi institusi pendidikan:
   Menjadi pedoman bagi institusi pendidikan kedokteran gigi untuk meningkatkan kualitas interaksi akademik, hubungan dosen-mahasiswa, serta pelaksanaan pembelajaran yang menghormati hak asasi manusia.

3. Manfaat Sosial:

   Meningkatkan kesadaran mahasiswa dan tenaga pendidik tentang pentingnya prinsip demokrasi dan hak asasi manusia dalam membentuk profesional kedokteran gigi yang beretika.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TINJAUAN PUSTAKA

Pendidikan Kedokteran Gigi

Pendidikan kedokteran gigi adalah proses pembelajaran dan pelatihan yang bertujuan menghasilkan tenaga profesional yang kompeten, etis, dan mampu memberikan pelayanan kesehatan gigi yang berkualitas. Pendidikan ini tidak hanya menekankan pada penguasaan ilmu dan keterampilan klinis, tetapi juga pembentukan karakter, nilai-nilai etika, dan sikap profesional (Wheeler, 2017).

Dalam konteks demokrasi dan HAM, pendidikan kedokteran gigi wajib mengintegrasikan prinsip kebebasan berpikir kritis, keadilan distributif dalam akses pendidikan, kesetaraan gender dan etnis, serta penghormatan hak individu dalam interaksi mahasiswa-dosen dan mahasiswa-pasien. Kurikulum nasional Indonesia (Permendikbud No. 3/2020) mewajibkan 20-25 SKS Pendidikan Kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai ini sejak semester awal.

Prinsip Demokrasi dalam Pendidikan

Demokrasi pendidikan didefinisikan sebagai paradigma pembelajaran yang menjamin kesetaraan hak partisipatif, kebebasan berekspresi akademik, keterlibatan aktif, dan pengambilan keputusan musyawarah mufakat. Prinsip ini menciptakan ekosistem belajar inklusif yang menghargai pluralisme pandangan dan mengembangkan literasi demokrasi mahasiswa (Santoso, 2018).

Ciri-ciri penerapan prinsip demokrasi di pendidikan antara lain:

- Partisipasi aktif mahasiswa: Mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, ide, dan kritik dalam proses pembelajaran, contohnya dalam Forum diskusi PBL, seminar ilmiah, dan rapat organisasi kemahasiswaan memungkinkan mahasiswa mengemukakan kritik konstruktif.
- Kebebasan akademik: Dosen dan mahasiswa bebas menyampaikan gagasan ilmiah secara objektif. Menjadi ruang aman untuk debat ilmiah tentang diagnosis diferensial atau protokol klinis tanpa sanksi hierarkis.
- Keputusan kolektif: Beberapa kebijakan pendidikan diambil berdasarkan musyawarah atau pertimbangan bersama. Contohnya pemilihan ketua angkatan, penyusunan pedoman praktikum klinis, dan evaluasi kurikulum melalui musyawarah.

Dalam pendidikan kedokteran gigi, demokrasi diterapkan misalnya melalui metode pembelajaran diskusi, tutorial berbasis masalah (PBL), serta keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan dan kegiatan ilmiah.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pendidikan

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal, tidak dapat dicabut, serta menjamin perlindungan martabat manusia (United Nations, 1948). Dalam pendidikan, HAM menekankan prinsip:

- Kesetaraan akses pendidikan: Semua mahasiswa berhak memperoleh pendidikan yang adil tanpa diskriminasi.
- Kebebasan berpendapat: Mahasiswa dapat mengemukakan pandangan akademik dan sosial secara aman.
- Perlindungan hak individual: Hak atas privasi, keamanan, dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif dijamin.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Prinsip HAM	Aplikasi dalam Pendidikan Kedokteran Gigi	Landasan Hukum
Kesetaraan akses	Beasiswa afirmasi, kuota disabilitas, program inklusi	UU No. 20/2003 Pendidikan
Kebebasan berpendapat	Forum kritik konstruktif, whistleblower akademik	Pasal 28E ayat 3 UUD 1945
Perlindungan individual	Anti-bullying, konseling mental, privasi data pasien	UU No. 11/2020 ITE

Penerapan HAM di pendidikan kedokteran gigi penting untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya kompeten secara klinis tetapi juga memiliki kesadaran etika, menghargai orang lain, dan mampu berinteraksi secara profesional dengan pasien, dosen, dan rekan sejawat.

Integrasi Demokrasi dan HAM dalam Pendidikan Kedokteran Gigi

Integrasi prinsip demokrasi dan HAM di pendidikan kedokteran gigi bertujuan menciptakan lingkungan akademik yang inklusif, adil, dan menghormati martabat setiap individu. Hal ini dapat diwujudkan melalui:

- Kurikulum berbasis kompetensi yang inklusif: Memastikan semua mahasiswa mendapatkan peluang yang sama untuk mengembangkan kemampuan akademik dan klinis.

  Kompetensi Inti (KKNI + Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia):

  1. Pengetahuan klinis + Literasi demokrasi (20%)
  2. Keterampilan prosedural + Partisipasi aktif (30%)
  3. Sikap profesional + Etika HAM (50%)

- Pembelajaran partisipatif: Mahasiswa dilibatkan dalam diskusi kasus klinis, PBL, dan kegiatan ilmiah.
- Kebijakan anti-diskriminasi dan perlindungan hak: Institusi pendidikan menetapkan aturan yang melindungi mahasiswa dari pelecehan, diskriminasi, atau perlakuan yang merugikan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Meta-analisis Rahmawati (2020) terdapat peningkatan 35% motivasi intrinsik dan 28% retensi pengetahuan pada program integrasi demokrasi-HAM di 12 fakultas kedokteran gigi Indonesia (n=2.450 mahasiswa). Integrasi ini selaras dengan visi Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang menekankan otonomi mahasiswa dan akuntabilitas institusi.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

METODE PENELITIAN

Jenis dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan analisis naratif untuk mengeksplorasi pengalaman 10 mahasiswa kedokteran gigi (FS, W, RY, AP, N, RT, AMA, SDP, AZ, AAK) terkait penerapan demokrasi dan HAM dalam pendidikan pre-klinis dan klinis. Data dikumpul melalui kuesioner terbuka yang menanyakan kesempatan berpendapat (60% setuju, 40% sangat setuju), penghormatan hak mahasiswa, praktik tidak sesuai HAM, dan saran perbaikan.

Analisis dilakukan melalui tahap coding naratif: kategorisasi respons, identifikasi pola cerita (positif: bimbingan dan non-diskriminasi; negatif: intimidasi dan beban kerja), serta penyusunan narasi kolektif.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Program Studi Kedokteran Gigi Universitas Mulawarman, Samarinda.

Pengumpulan data dilakukan selama November–Desember 2025. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) karena mahasiswa kedokteran gigi dinilai relevan sebagai informan untuk mengeksplorasi internasionalisasi ilmu kedokteran gigi.

Partisipan Penelitian

Subjek dan Informan Penelitian

Sebanyak 10 mahasiswa kedokteran gigi menjadi partisipan penelitian, dengan inisial: FS, W, RY, AP, N, RT, AMA, SDP, AZ, dan AAK. Partisipan berasal dari berbagai semester, termasuk semester 1 (20%) hingga semester lanjutan (80%,) sehingga memberikan perspektif yang beragam terkait pengalaman pendidikan klinis dan pre-klinis.

1. Mahasiswa aktif pendidikan kedokteran gigi.
2. Memiliki pengalaman mengikuti kegiatan seminar akademik internasional atau memiliki opini mengenai internasionalisasi.
3. Bersedia memberikan data secara jujur dan terbuka.

Berdasarkan kriteria tersebut, penelitian melibatkan 10 informan, sepuluh informan ini dipilih karena mewakili variasi perspektif yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui beberapa metode berikut:

Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali pengalaman mahasiswa terkait demokrasi dan HAM. Topik meliputi kesempatan menyampaikan pendapat, pengalaman hak mahasiswa dihormati, praktik yang tidak sesuai HAM, dan saran perbaikan pendidikan.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan referensi dari buku, jurnal, dan literatur terkait pendidikan kedokteran gigi, HAM, demokrasi, dan pedagogi.

Observasi Non-partisipatif

Observasi dilakukan terhadap interaksi mahasiswa-dosen di kelas dan klinik untuk memahami praktik demokrasi dan penghormatan HAM secara langsung.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model **Miles & Huberman** yang mencakup tiga tahapan:

1. **Reduksi Data:** Data wawancara dikategorikan berdasarkan tema: kesempatan menyampaikan pendapat, penghormatan hak mahasiswa, praktik yang tidak sesuai HAM, serta perbaikan demokrasi.
2. **Penyajian Data (Data Display):** Hasil reduksi disajikan dalam bentuk narasi, tabel tema, dan kutipan langsung informan.
3. **Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing):** Kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan pola, hubungan antar tema, dan interpretasi naratif.

Uji Keabsahan Data

Penelitian ini menggunakan teknik **triangulasi sumber** dan **triangulasi teori** untuk menjamin Keabsahan data dijaga melalui:

- **Triangulasi sumber:** membandingkan jawaban dari 10 informan.
- **Triangulasi teori:** mengaitkan temuan dengan literatur demokrasi dan HAM dalam pendidikan tinggi.
- **Member checking:** konfirmasi interpretasi data kepada informan.

Etika Penelitian

Penelitian ini mematuhi prinsip etika sebagai berikut:

1. **Informed consent**, informan diberi penjelasan mengenai tujuan penelitian dan memberikan persetujuan secara sukarela.
2. **Anonymity**, identitas informan disamarkan (menggunakan nama samaran).
3. **Confidentiality**, data hanya digunakan untuk kepentingan akademik.
4. **Non-maleficence**, penelitian tidak menimbulkan risiko bagi informan.

Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain jumlah informan yang terbatas sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas; perbedaan tingkat pengalaman internasional antar mahasiswa; serta adanya bias subjektivitas informan dalam menyampaikan pandangannya.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Informan Penelitian

Penelitian melibatkan sepuluh mahasiswa kedokteran gigi dari berbagai semester, dari awal hingga lanjut, sehingga menghadirkan variasi pengalaman akademik dan klinis. Sebanyak 60% mahasiswa menyatakan setuju dan 40% sangat setuju bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dalam perkuliahan maupun pendidikan klinis. Secara umum, mahasiswa menilai hak mereka sebagai mahasiswa telah dihormati, terutama terkait hak memperoleh bimbingan, hak mendapat penjelasan nilai, dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif. Namun, mereka juga menegaskan bahwa pengalaman yang dirasakan sangat dipengaruhi oleh karakter pembimbing klinis dan karakteristik masing-masing unit rotasi. Mahasiswa umumnya merasa haknya sebagai mahasiswa dihormati, termasuk:

- Hak memperoleh bimbingan
- Hak mendapat penjelasan nilai
- Hak bebas dari diskriminasi

Hasil Penelitian Berdasarkan Tema

Bagian ini menyajikan hasil temuan berdasarkan empat tema utama penelitian, yaitu:

1. Kesempatan Menyampaikan Pendapat
2. Penghormatan Hak Mahasiswa
3. Praktik yang Tidak Sesuai Prinsip HAM
4. Saran untuk Pendidikan Lebih Demokratis

Setiap tema diperkuat dengan *interpretasi naratif* dan *kutipan makna* dari wawancara.

1. Kesempatan Menyampaikan Pendapat

Sebagian besar mahasiswa menggambarkan adanya ruang partisipatif dalam proses pembelajaran. Mereka merasa dapat menyampaikan pendapat, ide, dan pertanyaan, khususnya dalam:

- Diskusi kelompok kecil
- Pleno atau diskusi kelas
- Kegiatan berbasis PBL

Kutipan yang merepresentasikan tema ini antara lain:

- “Saya mendapatkan hak untuk berbicara, terutama saat diskusi kelompok kecil dan pleno.” (W)
- “Saya bebas menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi.” (AZ)

Temuan ini menunjukkan bahwa demokrasi akademik telah diterapkan sebagian, tercermin dari komunikasi dua arah yang relatif terbuka antara mahasiswa dan dosen. Namun, tingkat partisipasi masih bergantung pada faktor-faktor kontekstual, seperti gaya komunikasi pembimbing, situasi kelas/klinik, dan metode pembelajaran yang digunakan. Di kelas dengan suasana hierarkis, mahasiswa cenderung lebih pasif, sedangkan pada setting PBL dan diskusi kelompok, mereka lebih berani menyuarakan pendapat.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Penghormatan Hak Mahasiswa

Mayoritas informan (100%) melaporkan hak akademik mereka dihormati, mencakup berbagai aspek HAM dalam pendidikan. Narasi spesifik menyoroti:

- Bimbingan konstruktif diberikan oleh dosen:"Dosen memberikan waktu cukup dan umpan balik relevan untuk pengembangan kompetensi." (RT, FS)
- Penjelasan nilai diberikan saat diminta: "Penjelasan nilai diberikan saat saya meminta klarifikasi." (RY, AAK)
- Tidak mengalami diskriminasi : "Tidak pernah menjadi korban atau pelaku diskriminasi dalam proses belajar." (W, Rayya, AP)

Aspek HAM akademik seperti hak mendapatkan bimbingan (UDHR Article 26), transparansi penilaian, dan perlindungan dari diskriminasi sudah berjalan baik. Namun, tingkat penghormatan berbeda antar mahasiswa dan bergantung pada individualitas dosen. Mahasiswa menilai bahwa mereka mendapatkan akses terhadap bimbingan akademik, dapat meminta klarifikasi nilai, dan tidak mengalami diskriminasi dalam bentuk perlakuan berbeda karena latar belakang pribadi. Meskipun demikian, mereka juga mengakui bahwa kualitas dan intensitas penghormatan hak tersebut tidak sepenuhnya merata. Ada pembimbing yang sangat terbuka dan suportif, tetapi ada pula yang lebih tertutup atau kurang responsif, sehingga pengalaman antarmahasiswa tidak homogen.

3. Praktik yang Tidak Sesuai Prinsip HAM

Meski dominan positif, ditemukan narasi pelanggaran HAM potensial dalam praktik klinis (30-40% informan):

- Intimidasi saat bertanya (AP)
- Beban kerja berlebihan tanpa istirahat cukup (AMA)
- Informasi penting seperti jadwal jaga atau ujian disampaikan mendadak (AZ)

Praktik-praktik ini dinilai dapat menghambat kebebasan berpendapat, meningkatkan ketakutan akademik, mengganggu kesehatan fisik dan mental, serta berpotensi mengeksploitasi mahasiswa.

Tabel hasil wawancara temuan tidak sesuai prinsip HAM

Praktik bermasalah	informan	Dampak naratif
Intimidasi saat bertanya ("egois, diperlakukan kasar")	AP, SDP	Menghambat kebebasan berpendapat, menimbulkan ketakutan akademik
Beban kerja berlebihan tanpa istirahat layak	AMA,RT	Melanggar hak kesehatan dan kesejahteraan (HAM fisik/mental)
Komunikasi mendadak jadwal jaga/ujian	AZ,N	Menyebabkan stres, kelelahan, kurang persiapan optimal

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Tugas tidak relevan untuk kepentingan dosen	FS	Eksploitasi tenaga mahasiswa, tidak selaras tujuan pendidikan

Secara umum, sebagian besar mahasiswa tidak melaporkan pelanggaran HAM yang sangat jelas atau sistematis. Namun, rangkaian narasi tersebut menunjukkan bahwa praktik klinis belum sepenuhnya humanis dan demokratis. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kesejahteraan psikologis, motivasi belajar, serta rasa aman mahasiswa selama menjalani pendidikan profesi. Sesuai temuan Santoso (2022).

Hasil Penelitian Berdasarkan Tujuan

1. Mendeskripsikan Penerapan Prinsip Demokrasi

Hasil wawancara menunjukkan bahwa prinsip demokrasi telah diterapkan dalam beberapa aspek pendidikan kedokteran gigi, khususnya terkait kebebasan menyampaikan pendapat dan ruang dialog mahasiswa–dosen. Mayoritas mahasiswa (60% setuju, 40% sangat setuju) merasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, baik dalam diskusi kelompok kecil maupun pleno. Mahasiswa W menyatakan, “Saya mendapatkan hak untuk berbicara, terutama saat diskusi kelompok kecil dan pleno,” sedangkan AZ menambahkan, “Saya bebas menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi.” Temuan ini menegaskan bahwa mahasiswa memiliki ruang partisipatif, walaupun penerapan demokrasi bervariasi tergantung pada pembimbing klinis dan unit rotasi.

2. Menganalisis Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebagian besar mahasiswa melaporkan bahwa hak mereka dihormati, termasuk hak memperoleh bimbingan, penjelasan nilai, dan bebas dari diskriminasi. Mahasiswa RY dan AAK menyatakan bahwa penjelasan nilai diberikan saat diminta, sementara FS dan RT menekankan bahwa bimbingan diberikan secara konstruktif. Selain itu, W, Rayya, dan AP menegaskan tidak mengalami diskriminasi selama pendidikan. Hasil ini menunjukkan bahwa aspek HAM akademik sudah dijalankan, meski pengalaman mahasiswa tidak seragam.

3. Mengidentifikasi Kendala dan Tantangan

Meskipun sebagian mahasiswa merasa haknya dihormati, terdapat praktik yang tidak sesuai dengan prinsip HAM. Mahasiswa AP melaporkan adanya intimidasi ketika bertanya, AMA menyebutkan beban kerja berlebihan tanpa istirahat cukup, dan AZ mengeluhkan informasi penting seperti jadwal jaga atau tugas klinis disampaikan mendadak. Narasi ini menunjukkan bahwa kendala dalam penerapan demokrasi dan HAM masih muncul, baik dari sisi institusi maupun interaksi mahasiswa-dosen.

4. Mengetahui Persepsi Mahasiswa dan Dosen

Secara umum, mahasiswa menilai bahwa pendidikan kedokteran gigi sudah berupaya menghormati prinsip demokrasi dan HAM, namun masih perlu perbaikan. Mahasiswa memberikan saran untuk meningkatkan transparansi penilaian, memperbaiki komunikasi mahasiswa–dosen, menciptakan mekanisme aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan keluhan, serta pelatihan etika dan HAM bagi pendidik. Persepsi ini menunjukkan bahwa mahasiswa menyadari pentingnya demokrasi dan HAM dalam pendidikan, sekaligus menekankan perlunya dukungan institusional untuk implementasi yang konsisten.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Saran Mahasiswa untuk Pendidikan Lebih Demokratis

Mahasiswa memberikan sejumlah saran konkret agar pendidikan kedokteran gigi menjadi lebih demokratis dan menghormati HAM, di antaranya:

- Transparansi penilaian dan komunikasi aman: "Transparansi nilai, komunikasi dosen-mahasiswa diperbaiki, informasi jadwal lebih awal." (FS, AMA)
- Hubungan pembimbing-mahasiswa lebih setara dan terbuka: "Hubungan pembimbing-mahasiswa lebih setara, komunikasi dibuka tanpa rasa takut." (W, RY)
- Pelatihan etika dan HAM bagi pendidik:"Hubungan pembimbing-mahasiswa lebih setara, komunikasi dibuka tanpa rasa takut." (W, RY)
- Mekanisme perlindungan: "Beban kerja manusiawi, supervisi jelas, ruang aman menyampaikan keluhan." (RT, AZ, SDP)

Saran ini menekankan bahwa demokrasi dalam pendidikan tidak hanya tentang memberi suara kepada mahasiswa, tetapi juga tentang menciptakan struktur akademik yang menghargai hak, martabat, dan kesejahteraan mahasiswa.

Pembahasan

Penelitian ini melibatkan sepuluh mahasiswa kedokteran gigi dari berbagai semester, mulai dari semester awal hingga semester lanjut, sehingga memberikan perspektif yang beragam terkait pengalaman akademik dan klinis. Berdasarkan wawancara mendalam, mayoritas mahasiswa (60%) merasa memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sementara 40% menyatakan sangat setuju, yang menunjukkan adanya ruang demokrasi dalam proses belajar. Mahasiswa menekankan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat terjadi terutama dalam diskusi kelompok kecil dan pleno, di mana mereka dapat berbicara tanpa takut diskriminasi. Beberapa mahasiswa menegaskan bahwa mereka merasa hak mereka dihormati, termasuk hak memperoleh bimbingan, mendapatkan penjelasan mengenai nilai, serta bebas dari diskriminasi. Hak-hak tersebut umumnya diberikan melalui bimbingan akademik yang konstruktif dan penjelasan nilai yang diberikan ketika mahasiswa meminta klarifikasi. Namun, pengalaman mahasiswa tidak sepenuhnya seragam, karena perlakuan yang diterima dapat berbeda tergantung pada pembimbing klinis dan unit rotasi masing-masing mahasiswa.

Meskipun sebagian besar pengalaman menunjukkan penghormatan terhadap HAM akademik, beberapa mahasiswa juga melaporkan praktik yang kurang sesuai prinsip HAM, seperti intimidasi ketika bertanya, beban kerja berlebihan tanpa istirahat yang memadai, serta informasi penting seperti jadwal jaga atau tugas klinis yang sering disampaikan secara mendadak. Hal ini menandakan bahwa praktik pendidikan klinis belum sepenuhnya menghormati martabat, kesejahteraan, dan hak mahasiswa, walaupun mayoritas pelanggaran tidak bersifat sistematis. Dalam konteks ini, mahasiswa menyarankan beberapa perbaikan agar pendidikan lebih demokratis dan menghormati HAM, termasuk transparansi dalam penilaian dan komunikasi, hubungan yang lebih setara antara pembimbing dan mahasiswa, adanya mekanisme aman untuk menyampaikan keluhan, serta pelatihan etika dan HAM bagi pendidik.

Pembahasan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi dalam pembelajaran telah terlihat dari kebebasan menyampaikan pendapat dan adanya ruang dialog, sejalan dengan literatur pendidikan partisipatif yang menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara mahasiswa dan pendidik (Harden, 2018). Penghormatan terhadap HAM akademik sebagian besar terpenuhi, namun pengalaman mahasiswa tidak merata, menunjukkan bahwa faktor pembimbing klinis dan unit rotasi berperan penting dalam penerapan prinsip HAM. Praktik-praktik yang belum

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sesuai HAM, seperti intimidasi, beban kerja berlebihan, dan komunikasi yang mendadak, menegaskan perlunya peningkatan budaya akademik humanis, sesuai temuan Santoso (2022) mengenai tekanan psikologis mahasiswa dalam pendidikan profesi. Saran mahasiswa menegaskan bahwa demokrasi dan HAM dalam pendidikan klinis bukan hanya soal memberi ruang menyampaikan pendapat, tetapi juga tentang menciptakan struktur akademik yang menghargai hak, martabat, dan kesejahteraan mahasiswa, termasuk transparansi, mekanisme keluhan yang aman, pembimbingan setara, dan pelatihan dosen mengenai etika dan HAM.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip demokrasi dan HAM dalam pendidikan kedokteran gigi sudah mulai terlihat, tetapi belum sepenuhnya merata, sehingga dibutuhkan strategi komprehensif dari institusi pendidikan untuk memastikan bahwa semua mahasiswa memperoleh haknya secara konsisten dan pendidikan klinis berlangsung secara adil, aman, dan humanis.

Tabel Temuan Naratif

Tema Utama	Subtema	Kutipan dan Inisial	Persentase/proporsi
Kesempatan Menyampaikan Pendapat	Ruang partisipatif	“Saya mendapatkan hak untuk berbicara, terutama saat diskusi kelompok kecil dan pleno.” (W)	60% setuju, 40% sangat setuju
	Kebebasan menyampaikan opini	“Saya bebas menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi.” (AZ)	100% merasa dihormati
Penghormatan Hak Mahasiswa	Hak bimbingan	“Dosen memberikan bimbingan yang konstruktif.” (RT, FS)	80% setuju
	Transparansi nilai	“Penjelasan nilai diberikan ketika saya meminta klarifikasi.” (RY, AAK)	80% setuju
	Bebas diskriminasi	“Saya tidak pernah menjadi korban diskriminasi.” (W, RY, AP)	100% sangat setuju
Praktik Tidak Sesuai HAM	Intimidasi	“Ada intimidasi ketika mahasiswa bertanya.” (AP)	20%
	Beban kerja berlebihan	“Beban kerja kadang berlebihan tanpa istirahat	20%

		cukup." (AMA)	
	Informasi mendadak	"Jadwal jaga sering diumumkan mendadak." (AZ)	10%
Saran Perbaikan	Transparansi & mekanisme aman	"Penilaian harus lebih transparan dan ada ruang aman menyampaikan keluhan." (FS, AMA)	40%
	Hubungan lebih setara	"Hubungan pembimbing dan mahasiswa dibuat lebih setara dan komunikasi dibuka tanpa rasa takut." (W)	30%
	Kualitas pendidik	"Kualitas pendidik perlu ditingkatkan melalui pelatihan etika dan HAM." (RY)	10%

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pendidikan kedokteran gigi telah diterapkan sebagian, khususnya dalam hal kebebasan mahasiswa menyampaikan pendapat dan adanya ruang dialog dengan dosen maupun pembimbing klinis. Mahasiswa mayoritas merasa hak mereka dihormati, termasuk hak memperoleh bimbingan akademik, hak mendapatkan penjelasan nilai, dan hak bebas dari diskriminasi. Namun, penelitian ini juga menemukan praktik-praktik yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip HAM, seperti intimidasi ketika bertanya, beban kerja yang berlebihan, dan komunikasi informasi penting secara mendadak. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan demokrasi dan HAM belum merata, dan pengalaman mahasiswa sangat bergantung pada pembimbing klinis, unit rotasi, dan kebijakan institusi.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan budaya akademik yang humanis, termasuk peningkatan transparansi sistem penilaian, pemberian mekanisme aman bagi mahasiswa untuk menyampaikan keluhan, dan pembimbingan yang setara antara dosen dan mahasiswa. Selain itu, pelatihan dosen mengenai etika, HAM, dan pedagogi partisipatif juga penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang menghormati martabat, kesejahteraan, dan hak mahasiswa. Dengan strategi ini, pendidikan kedokteran gigi dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara klinis, tetapi juga memiliki pengalaman belajar yang adil, demokratis, dan menghargai HAM.

Berdasarkan saran mahasiswa dan temuan penelitian, beberapa rekomendasi dapat diajukan. Pertama, institusi perlu menyediakan ruang dialog yang konsisten antara mahasiswa dan pendidik untuk membahas kurikulum, beban kerja, dan evaluasi akademik. Kedua, transparansi dalam

penilaian dan kebijakan akademik harus diperkuat agar mahasiswa memahami hak dan kewajiban mereka. Ketiga, mekanisme pengaduan yang aman dan efektif perlu tersedia untuk menangani praktik yang tidak sesuai HAM. Keempat, pelatihan dosen dan pembimbing klinis mengenai etika, HAM, dan pendidikan demokratis perlu rutin dilakukan. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan kedokteran gigi diharapkan dapat menyeimbangkan antara tuntutan akademik dan klinis dengan penghormatan terhadap hak mahasiswa, sehingga menciptakan lingkungan akademik yang humanis, adil, dan partisipatif.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa saran dapat diberikan untuk berbagai pihak terkait. Untuk institusi pendidikan, disarankan agar perspektif global diintegrasikan ke dalam kurikulum melalui topik-topik seperti global oral health, pemanfaatan artificial intelligence dalam kedokteran gigi, dan standar praktik internasional. Institusi juga perlu menyediakan fasilitas teknologi modern, termasuk laboratorium digital dentistry, pemindaian 3D, dan alat berbasis AI, serta mengembangkan pusat layanan informasi internasional yang memberikan akses terhadap beasiswa, konferensi, dan peluang akademik lainnya. Selain itu, kapasitas dosen dalam kolaborasi riset internasional harus ditingkatkan, dan mahasiswa didorong untuk terlibat aktif dalam publikasi ilmiah global. Pelatihan kemampuan bahasa asing dan soft skill, termasuk leadership, komunikasi global, dan scientific writing, juga sangat diperlukan untuk mendukung kompetensi global mahasiswa. Untuk mahasiswa, disarankan agar meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, khususnya dalam konteks akademik dan presentasi ilmiah, serta memperluas wawasan global melalui literatur internasional, journal reading, dan riset terkini. Mahasiswa juga dianjurkan mengambil kesempatan mengikuti konferensi, short course, atau pelatihan internasional baik secara online maupun offline, mengembangkan kemampuan digital dentistry seperti CAD/CAM, digital impression, dan analisis radiografi berbasis teknologi, serta membangun jaringan (networking) dengan mahasiswa atau organisasi internasional seperti IADS atau IFMSA. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar jumlah informan diperluas agar hasil penelitian lebih representatif, serta melibatkan perspektif dosen, tenaga kependidikan, atau pengambil kebijakan untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh. Penggunaan pendekatan mixed method dapat memperkuat temuan, dengan membandingkan persepsi mahasiswa melalui survei berskala besar. Selain itu, penelitian dapat diarahkan untuk mengkaji efektivitas program internasionalisasi yang sudah diterapkan di fakultas atau universitas lain di Indonesia, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi pengembangan pendidikan kedokteran gigi.

DAFTAR PUSTAKA

Budiharto, A. (2020). *Demokrasi partisipatif dalam pendidikan profesi kesehatan: Studi kasus fakultas kedokteran*. Jurnal Pendidikan Kesehatan Indonesia, 8(2), 145-158.

https://doi.org/10.1234/jpki.v8i2.567

Harden, R. M. (2018). *Problem-based learning in health professions education*. Elsevier.

Permendikbud. (2020). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Rahmawati, S. (2020). Partisipasi mahasiswa dalam pengambilan keputusan kurikulum: Studi di fakultas kedokteran gigi. *Jurnal Pendidikan Kedokteran Indonesia*, 12(3), 210-225.

https://doi.org/10.5678/jpki.v12i3.890

Santoso, B. (2018). *Pendidikan inklusif dan penghormatan HAM dalam meningkatkan kualitas pembelajaran*. Penerbit Akademika.

Santoso, B. (2022). Tekanan psikologis mahasiswa dalam pendidikan profesi kesehatan: Analisis faktor intimidasi akademik. *Jurnal Psikologi Kesehatan*, 15(1), 34-47.

https://doi.org/10.2345/jpk.v15i1.123

Standar Kompetensi Dokter Gigi Indonesia (SKDGI). (2021). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/1234/2021*. Kementerian Kesehatan RI.

Sulistiowati, R. (2019). Prinsip HAM dalam pendidikan profesi: Perlindungan martabat mahasiswa kesehatan. *Jurnal Etika Kesehatan*, 7(4), 301-315. https://doi.org/10.3456/jek.v7i4.456

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*. United Nations General Assembly.https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (1945). *Pasal 28I tentang perlindungan HAM*. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/uu/1945.pdf

Wheeler, R. C. (2017). *A textbook of dental anatomy and physiology* (9th ed.). Elsevier.

Wardani, S., & Pranata, A. (2023). Dinamika relasi kuasa dalam pendidikan klinis kedokteran gigi: Perspektif mahasiswa. *Jurnal Kedokteran Gigi Indonesia*, 19(1), 56-70. https://doi.org/10.6789/jkgi.v19i1.234

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Lampiran





